

Naskah Publikasi

**KOMUNIKASI BENCANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI
KAWASAN PLTA KOTO PANJANG KAMPAR, RIAU**

Disusun Oleh
Pipit Barato Vaneza
14321169

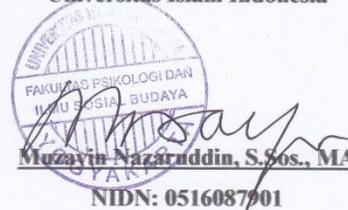
08 JUN 2018

Telah disahkan oleh dosen pembimbing skripsi pada:



Mengetahui

**Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**



**KOMUNIKASI BENCANA DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR DI KAWASAN PLTA KOTO PANJANG,
KAMPAR, RIAU**

Pipit Barato Vaneza

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII,

menyelesaikan studi pada tahun 2018

Muzayin Nazaruddin

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII

Abstract:

In the event of a disaster, coordination of communication is an important thing, because at the time of the disaster there are many demands from the public to government agencies responsible for dealing with disasters quickly and appropriately. This study focuses on overall disaster communications conducted by agencies engaged in disaster and surrounding communities in disaster areas, ranging from the pre, during, until after the floods in Koto Panjang Hydroelectric district, Kampar. To mitigate flooding in Kampar, BPBDs perform two programs: disaster resilient village (DESTANA) was run in two villages namely, Village Mentulik in 2016 and Desa Buluh China in 2017, as well as standby picket program. Currently there are emergency response and emergency information provision and logistics. In the aftermath there is a data collection phase loss and damage and the reconstruction and rehabilitation. This study get the result that at the time of communication used Predisaster pattern is a pattern of chains and wheels, the emergency response using Y pattern and wheels, the post-disaster period using chain patterns. In presenting the information, the government uses a variety of mediums to disseminate disaster information, the most dominant medium used is WhatsApp. Grooves contained in the communication structural and non-structural. The supporting factors when making emergency response which is the number of stakeholders. While the inhibiting factors when making emergency response is divided into two, namely, internal constraints and external constraints.

Keywords: disaster Communication, Communication Patterns, Flood

PENDAHULUAN

Kata bencana sudah tidak asing lagi didengar di telinga masyarakat Indonesia. Banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya secara tidak diduga-duga. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 1 tentang penanggulangan bencana, telah dikemukakan bahwa “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Pada saat terjadi bencana, koordinasi dalam melakukan komunikasi merupakan sebuah hal yang penting, karena pada saat bencana terjadi terdapat banyak sekali tuntutan dari masyarakat kepada lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam menangani bencana secara cepat dan tepat. Selain itu, pada saat terjadi bencana tidak sedikit pula lembaga swasta atau komunitas-komunitas yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana muncul untuk membantu menangani permasalahan tersebut, sehingga tidak jarang pula komunikasi antar lembaga pemerintah dan swasta tidak terkoordinasi dengan baik dalam menanggulangi bencana tersebut.

Kecepatan informasi yang ingin didapat oleh masyarakat menjadi tugas yang harus dikerjakan dengan baik pula oleh lembaga pemerintah, agar informasi yang tersebar menjadi tidak simpang siur dan memiliki kepastian, sehingga dapat mengurangi informasi yang tidak jelas sumbernya. Berdasarkan data statistik bencana BPBD Provinsi Riau, pada tahun 2016 terdapat 7 kejadian bencana banjir, dimana bencana banjir tersebut merupakan bencana yang paling sering terjadi di Provinsi Riau dibandingkan bencana lainnya. Bencana banjir terbesar di Provinsi Riau terdapat di daerah PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Banjir bukan merupakan hal baru bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan waduk PLTA Koto Panjang, sebab masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan tersebut selalu terkena dampaknya setiap tahun secara berulang.

PLTA Koto Panjang merupakan sebuah perusahaan listrik tenaga air yang terdapat di daerah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Turbin PLTA ini digerakkan menggunakan air dari Sungai Kampar. Pada musim curah hujan meningkat, PLTA tidak jarang harus membuka penutup pintu air dikarenakan ketidakmampuannya menahan air.

Berdasar data pra riset yang didapat, banjir disebabkan oleh tidak mampunya pintu air membendung aliran air sungai Kampar setiap curah hujan meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PLTA Koto Panjang adalah dengan mengimbau warga untuk mengungsi dan menyelamatkan beberapa barang berharga ke tempat yang lebih aman saat status sudah menunjukkan tingkat waspada, dan membuka pintu air yang kemudian dapat membuat kawasan di sekitar waduk PLTA Koto Panjang terendam banjir. Namun berdasarkan penuturan warga, pihak PLTA Koto Panjang pernah tidak memberi imbauan pada warga sehingga warga tidak memiliki persiapan.

Penelitian ini berfokus pada komunikasi bencana secara menyeluruh yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kampar dengan pihak-pihak terkait, diantaranya PLTA Koto Panjang, BMKG Pekanbaru dan masyarakat sekitar kawasan bencana, mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, hingga pasca bencana banjir di kawasan PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar.

Signifikasi membahas komunikasi bencana secara menyeluruh adalah dalam mengatasi penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan pada saat terjadi bencana saja, tetapi memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dan mengetahui bagaimana karakteristik bencana menjadi hal yang juga dianggap penting yang harus diperhatikan, agar setiap elemen baik bagi lembaga pemerintah, non pemerintah serta masyarakat disekitar kawasan bencana banjir, agar dapat mengantisipasi dan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, sehingga kemungkinan terdapatnya korban jiwa semakin berkurang. Selain itu, pentingnya membahas komunikasi bencana adalah pada saat terjadi bencana maka akan banyak pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana, baik dari

lembaga pemerintah, non pemerintah, relawan, maupun dari masyarakat sekitar kawasan bencana banjir yang turut membantu.

Pentingnya memperhatikan koordinasi komunikasi pada saat bencana terjadi adalah untuk tercapainya tujuan bersama, yaitu mampu menanggulangi bencana dengan efektif dan baik. Dalam sebuah penanggulangan bencana, akan terdapat seseorang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab, seperti yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana, Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD untuk melaksanakan fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana (Undang-Undang Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana). Maka pentingnya koordinasi komunikasi dalam penanggulangan bencana adalah untuk melihat bagaimana kesiapan dari pihak-pihak terkait dalam menanggulangi bencana tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah, bagaimana komunikasi bencana pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kampar, Riau? Bagaimana pola yang terbentuk dari komunikasi bencana tersebut? dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan komunikasi bencana tersebut?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk menjelaskan bagaimana pola komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kampar dan berbagai pihak terkait lainnya dalam menanggulangi bencana banjir yang terdapat di PLTA Koto Panjang daerah Kampar, Provinsi Riau, dan untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan komunikasi bencana tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menghindari kesamaan penelitian, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Terdapat 5 penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian yang peneliti lakukan. Pertama, penelitian yang berjudul *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak* (Musyadad, *et.al*, 2015). Penelitian kedua berjudul *Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang* (Nisa', Fachiratun 2014). Penelitian ketiga dilakukan oleh Surtini (2014), dengan judul *Kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Pencegahan Bencana Banjir Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Putra, Febrian Kurnia, Sri Hastjarjo, dengan judul *Aktivitas Komunikasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar (Deskriptif Kualitatif Megenai Aktivitas Komunikasi di BPBD Kab. Karanganyar dalam Pengenalan Mitigasi Bencana kepada Masyarakat Kab.Karanganyar)*. Penelitian kelima dilakukan oleh Syarif, Ahmad, dkk (2014) berjudul *Pentingnya Komunikasi dan Informasi pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulan Bencana di Kota Makassar*.

Dari lima penelitian terdahulu diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dalam fokus penelitian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kelima penelitian diatas lebih membahas mengenai kinerja BPBD, penanganan saat bencana dan pasca bencana, kontribusi BPBD dalam meningkatkan kesadaran saat pra bencana, dan mengenai pemanfaatan media. Tidak ada atau belum terdapat penelitian yang membahas seluruh elemen yang terdapat dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

KERANGKA TEORI

Bencana dan Penanggulangan Bencana

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia seakan terbiasa mendengar kata bencana. Indonesia yang secara geografis terletak di daerah rawan bencana, mau tidak mau membuat masyarakat Indonesia harus siap dengan segala bencana atau kejadian yang akan terjadi, baik yang terjadi secara tiba-tiba maupun bencana yang terjadi secara bertahap. Dalam menanggulangi bencana, maka pihak-pihak yang terlibat haruslah mengetahui skala dan tingkat bahaya dari bencana yang sedang terjadi, apakah bencana tersebut dalam tingkat bahaya ringan, menengah, berat atau bahkan mencapai tingkat bahaya dahsyat (Arie, 2009: 23). Menurut Bintoro (dalam Susanto, 2011: 64), menjelaskan bahwa siklus bencana bermula pada saat bencana, dimana pada fase ini keadaan berubah menjadi kacau balau yang menyebabkan kritis yang membutuhkan mobilisasi sumber daya dari luar, baik berupa barang dan material sehingga kondisi tersebut dinyatakan sebagai kondisi tanggap darurat. Setelah tanggap darurat dijalankan dan kondisi cukup membaik, maka pemulihan awal yang dilanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai hingga kondisi dapat kembali berjalan membaik dan normal. Fase rekonstruksi dan rehabilitasi ini masih membutuhkan mobilisasi sumber daya dari luar, namun tidak mendesak seperti kondisi tanggap darurat. Siklus terakhir dari bencana yaitu pada saat kondisi suatu daerah bencana sudah kembali normal, maka pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penting dilakukan agar ketika terjadi bencana pemerintah serta masyarakat berada dalam keadaan siap untuk meminimalisir dampak dari bencana.

Komunikasi Bencana

Dalam melakukan komunikasi bencana, terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengurangi resiko bencana, yaitu *preparedness*, *mitigation*, *response*, dan *recovery* (Purnomo, & Rony, 2010: 89-90). Tahapan-tahapan bencana

dilakukan agar resiko yang timbul saat bencana dapat berkurang, sehingga kerugian-kerugian yang timbul setelah bencana terjadipun tidak banyak. Menurut Nurjanah (2012:17), adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam menjalankan komunikasi bencana adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan penanggulangan bencana, bagian ini merupakan penyusunan data dalam resiko yang terdapat akibat bencana.
- b. Pengurangan resiko bencana, yaitu untuk mengurangi dampak buruk yang terjadi akibat bencana.
- c. Pencegahan bencana, yaitu dengan mempersiapkan apa saja langkah-langkah yang akan diambil pada saat terjadi bencana.
- d. Pemanduan kedalam perencanaan pembangunan, dimana terdapat unsur-unsur dalam menanggulangi bencana.
- e. Persyaratan analisis resiko bencana, dimana sebelum bencana terjadi maka diperlukan penelitian dan studi mengenai kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk terjadi bencana.
- f. Perencanaan dalam penanggulangan bencana terhadap masyarakat, dimana hal tersebut juga termasuk kedalam bagian pengurangan resiko bencana.
- g. Pendidikan dan latihan, hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki siap cepat tanggap pada saat bencana terjadi.
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Dalam melakukan komunikasi bencana, pihak yang bertanggungjawab tidak hanya dapat memperhatikan komunikasi saat terjadi bencana saja, tetapi juga harus memperhatikan komunikasi saat pra dan pasca bencana. Selama ini, komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat terdampak bencana hanya berfokus pada masa tanggap darurat. Menurut Sudibyakto dalam Susanto (2011: 48), komunikasi dengan masyarakat yang terdampak bencana pada masa prabencana dianggap satu hal yang sangat penting yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Hal tersebut juga didukung oleh PJ, Prihadi dalam Susanto (2011: 11) yang mengatakan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana

dapat dilakukan dengan 8 cara, yaitu meningkatkan pemahaman dalam penanganan bencana untuk aparat pemerintah daerah, pelatihan kepada masyarakat untuk tanggap bencana, paket pendidikan masyarakat, pembuatan peta jalur evakuasi, pembuatan dan pemasangan *signboard*, simulasi berkala sistem peringatan dini dan evakuasi, kampanye melalui media cetak dan elektronik, dan pelatihan untuk siswa sekolah. Komunikasi yang dilakukan dalam melakukan kesiapsiagaan dan menanggulangi bencana juga harus dilakukan antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak bencana. Hal tersebut diatur dalam pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan pada tahap prabencana, dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat situasi bencana.

Pola Komunikasi

Dalam melakukan komunikasi, dibutuhkan sebuah jaringan komunikasi yang berfungsi sebagai penyambung pesan antara satu orang dengan orang lain atau yang biasa disebut saluran. Jaringan sangat dibutuhkan dalam melakukan komunikasi, jika tidak terdapat sebuah jaringan maka pesan yang akan disampaikan oleh pengirim pesan tidak dapat dipastikan apakah pesan tersebut sampai atau tidak kepada penerima pesan. Devito (1996: 344), membagi jaringan komunikasi menjadi 5 struktur dimana jaringan komunikasi ini biasa digunakan dalam perspektif kelompok kecil maupun perspektif organisasi. Adapun kelima struktur jaringan tersebut, yaitu struktur lingkaran, struktur roda, struktur Y, struktur rantai, dan struktur semua saluran.

Dalam melakukan komunikasi, setiap pemimpin maupun anggota yang ingin menyampaikan pesan kepada anggota lain, tidak hanya dapat dilakukan melalui media yang bersifat formal, namun juga bisa disampaikan menggunakan media informal, seperti tatap muka, telepon maupun setiap media yang dapat menghubungkan setiap anggota maupun pemimpinnya. Selama pesan dapat diterima oleh penerima pesan, maka media sudah tidak menjadi suatu masalah untuk melakukan komunikasi.

Selain jaringan, dalam melakukan komunikasi juga terdapat arus komunikasi, terdapat tiga bentuk arah arus komunikasi dimana dalam arus komunikasi tersebut dapat ditemukan masalah-masalah dalam melakukan komunikasi. Ketiga arus komunikasi tersebut, yaitu komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan komunikasi literal.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus memiliki keunggulan, yaitu dalam meneliti suatu kasus peneliti melakukan pengumpulan data dari banyak ragam sumber yang dimana kasus tersebut dicari kedalaman penjelasannya, sehingga studi kasus tidak hanya mampu membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan eksploratif (apa), deskriptif (bagaimana), namun juga pertanyaan eksplanatif (mengapa) (Riyanto dalam Narendra, 2008: 87).

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan (Oktober 2017-Maret 2018). Pengumpulan data berlokasi di sekitar kawasan rawan bencana banjir, tepatnya di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kampar, PLTA Koto Panjang, Desa Buluh Cina, Desa Kampung Terendam dan Dusun Kampung Deling, Kampar. Peneliti juga mengumpulkan data di Kantor BMKG Pekanbaru, kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau.

Dalam melakukan pemilihan narasumber, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana narasumber dipilih secara sengaja. Narasumber dalam penelitian terdapat 2 tipe, yaitu pemerintah dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Komunikasi Menggunakan Struktur Rantai dan Struktur Roda Pada Masa Pra Bencana

Dalam membahas pola komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait pada masa pra bencana, peneliti membagi pembahasan kedalam 2 kategori, yaitu pola komunikasi yang dilakukan antar instansi-instansi pemerintah dan pola komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat di kawasan rawan bencana.

Pada masa pra bencana, informasi mengenai prakiraan cuaca penting untuk diketahui oleh setiap instansi yang terkait penanggulangan bencana dan juga masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Informasi mengenai prakiraan cuaca terutama intensitas hujan perdasarian, baik prakiraan per-bulan, per-sepuluh harian, maupun prakiraan cuaca harian di Kabupaten Kampar selalu diberikan oleh BMKG Pekanbaru. Adapun pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat pra bencana yaitu, informasi terkait prakiraan cuaca tersebut diseminasikan kepada PLTA Koto Panjang, BPBD Kabupaten Kampar serta instansi terkait bencana lainnya, termasuk di dalamnya Bupati. Setelah informasi tersebut sampai kepada Bupati, maka Bupati menurunkan informasi tersebut kepada Kecamatan, Kecamatan lalu ke Desa.

Melihat pola komunikasi yang dilakukan BMKG Pekanbaru dalam memberikan informasi kepada instansi terkait, peneliti melihat adanya kecocokan pola komunikasi yang dilakukan dengan struktur rantai. Struktur rantai yaitu, anggota yang berada di posisi tengah memiliki peran sebagai pemimpin yang dapat melakukan komunikasi dengan orang-orang yang berada di sebelah kanan maupun kirinya, sedangkan orang yang berada di posisi paling ujung, hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja (Devito, 1997: 345). Selain 3 orang yang berada di tengah dapat saling melakukan komunikasi dengan dua orang di sisi kanan dan kirinya, struktur jaringan rantai menurut Leavitt (dalam Tubbs dan Moss, 1996), mengatakan bahwa struktur jaringan rantai merupakan struktur jaringan yang paling

baik diantara struktur jaringan lainnya, dimana struktur rantai memiliki kinerja yang lebih cepat. Maka dari itu, dalam pola komunikasi rantai, anggota yang berada di tengah dapat menjadi sentral komunikasi agar tujuan dalam melakukan penanggulangan untuk mengurangi resiko bencana dapat berjalan dengan baik.

Jika dikaitkan dengan hasil temuan data, maka BMKG Pekanbaru berada di posisi paling awal. PLTA, Bupati dan BPBD berada di posisi tengah, dimana BPBD dapat melakukan komunikasi dengan PLTA dan Bupati untuk mengetahui ketinggian air di waduk dan mengenai perencanaan penanggulangan pencegahan resiko bencana. Diseminasi informasi yang dilakukan BMKG Pekanbaru kepada instansi-instansi pemerintahan terkait, dilakukan dengan secara struktural dan non-struktural. BMKG melakukan diseminasi informasi dengan mengirimkan buletin terkait prakiraan cuaca baik berupa hardcopy maupun softcopy. Selain mengirimkan buletin berupa hardcopy secara langsung kepada instansi-instansi, BMKG juga selalu menginformasikan prakiraan cuaca harian melalui media sosial Twitter dan mengirimkan buletin yang berupa softcopy via grup Whatsapp (media sosial) siaga bencana, yang di dalamnya terdapat para pemangku kepentingan setiap instansi.

Selain pola komunikasi yang dilakukan antar instansi pemerintahan, terdapat juga pola komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat di kawasan rawan bencana. Setelah informasi diseminasikan kepada setiap instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana dan disebarkan Bupati hingga ke Desa setempat yang termasuk kedalam kawasan rawan bencana, maka dalam menanggulangi bencana, mitigasi bencana menjadi suatu hal yang penting. Mitigasi merupakan suatu cara pencegahan resiko bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, agar pada saat terjadi bencana, masyarakat yang terdampak dapat menyelamatkan diri sendiri sehingga dapat menghindari terdapatnya korban jiwa.

Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam mengurangi resiko bencana, BPBD merupakan salah satu instansi yang bergerak dalam bidang kebencanaan, melakukan mitigasi bencana merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh BPBD, dimana terdapat bidang khusus yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan mitigasi bencana, yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Dalam melakukan mitigasi, BPBD melakukan 2 program, yaitu Desa Tangguh Bencana dan Piket Siaga. Adapun alur komunikasi dalam melakukan desa tangguh bencana yaitu berasal dari BPBD yang disampaikan kepada relawan desa, dalam hal ini yang menjadi relawan desa yakni aparat desa, pemuda desa, ninik mamak (orang yang dituakan).

Pola komunikasi tersebut cocok dengan struktur roda. Struktur roda yakni struktur yang memiliki pemimpin yang jelas yang berada pada posisi sentral. Dalam melakukan program desa tangguh bencana, pola roda peneliti anggap sangat cocok dengan pola komunikasi yang dijalankan oleh BPBD dimana pola tersebut merupakan pola yang paling efisien untuk digunakan. Menurut Leavitt (dalam Tubbs dan Moss 1996), dalam menetapkan sebuah prosedur yang akan dilakukan secara terus menerus, para anggota yang berada dalam struktur roda mampu mengatur diri mereka sendiri. Selain itu, efektifitas kerja dalam melakukan program DESTANA, dapat dinilai tergantung pada orang yang berada di posisi sentral, apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak karena orang yang berada di posisi sentral dianggap memiliki kekuatan terbesar dalam menjalankan sebuah komunikasi.

Jika dikaitkan dengan pola komunikasi yang dilakukan oleh BPBD, aparat desa, pemuda desa serta ninik mamak saat menjalankan program desa tangguh bencana, BPBD berada di posisi pusat, dan merupakan pemimpin dalam melakukan komunikasi. Dalam hal ini, baik pemuda desa, aparat desa serta ninik mamak akan melakukan komunikasi terkait penanggulangan bencana melalui BPBD, maksudnya adalah jika tidak ada pemimpin (dalam hal ini BPBD) untuk melakukan program desa tangguh bencana, maka tidak akan ada pula komunikasi yang dilakukan oleh pemuda

desa, aparat desa serta ninik mamak terkait penanggulangan bencana banjir di desa mereka.

Dalam melakukan program DESTANA, BPBD menggunakan saluran komunikasi berupa sosialisasi, pelatihan dan simulasi kepada relawan desa. Setelah setiap relawan desa mengikuti program DESTANA, maka relawan juga bertugas untuk menyampaikan informasi-informasi yang sudah didapat kepada setiap warga desa tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, peneliti melihat bahwa dalam melakukan sosialisasi, pelatihan dan simulasi, komunikasi tidak hanya terpusat kepada pemateri (BPBD), namun baik pemateri maupun peserta (relawan) dapat saling berinteraksi satu sama lain, seperti halnya kegiatan tanya jawab. Sehingga dengan melakukan pola yang seperti itu, pemerintah akan mendapat informasi lain dari masyarakat terkait bencana.

Melihat pola komunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam berkomunikasi terkait bencana, baik secara struktural dan non-struktural ternyata hal tersebut dapat membantu efektivitas alur komunikasi ke bawah. Tubbs dan Moss (1996: 92), mengatakan bahwa dalam memberikan pesan melalui saluran lebih dari satu, maka hal tersebut dinilai memiliki kelebihan yaitu selain dapat memberi informasi, menggunakan saluran lebih dari satu juga dapat membantu memastikan bahwa pesan tersebut akan diingat oleh penerima pesan.

B. Pola Komunikasi Menggunakan Struktur Roda dan Struktur Y Pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Komunikasi yang dilakukan saat masa tanggap darurat bencana yaitu informasi yang berasal dari BMKG Pekanbaru terkait prakiraan cuaca. Kemudian diberikan kepada PLTA Koto Panjang serta dinas-dinas terkait termasuk didalamnya Bupati. Dengan melihat prakiraan cuaca yang diberikan oleh BMKG, maka PLTA yang berada di bagian operasional bertugas untuk melihat ketinggian air yang berada di waduk saat itu, dan jika terjadi hujan yang deras maka PLTA Koto Panjang bertugas memantau kenaikan air. Jika kenaikan air banyak dan tinggi, maka PLTA

akan melakukan pembukaan pintu berdasarkan SOP (*Standard Operasional Procedure*) yang ada. Pada saat dilakukannya pembukaan pintu, maka PLTA bertugas melakukan koordinasi kepada Manajer PL Kota Pekanbaru dan memberikan informasi kepada Bupati yang kemudian PLTA juga menyebarkan surat tersebut langsung kepada tembusan, yaitu TNI, POLRI, BPBD Kampar, Dinas Soisal, Dinas Kesehatan, Dinas PU-PR, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan. Selain itu PLTA Koto Panjang juga menyebarkan surat terkait informasi pembukaan pintu langsung kepada Kecamatan dan setiap Kepala Desa yang wilayahnya berada di sepanjang aliran sungai dan termasuk kawasan rawan bencana. Kepala Desa meneruskan informasi tersebut kepada Kepala Dusun, Kepala Dusun kepada warga desa.

Saat masa bencana, PLTA merupakan sentral informasi awal bagi instansi lainnya. Dimana bencana dapat terjadi dari kenaikan air sungai yang cukup tinggi akibat pembukaan pintu air di waduk PLTA Koto Panjang. Sehingga ketika pembukaan pintu air sudah dilakukan, darisana BPBD mulai melakukan patroli dan monitoring untuk melihat ketinggian air. Dalam melakukan penyebaran informasi mulai dari pembukaan pintu, pengurangan pembukaan pintu hingga penutupan pintu air, PLTA melakukan penyebaran informasi secara struktural dan non-struktural. Secara struktural, PLTA Koto Panjang melakukan penyebaran informasi melalui media surat resmi, sehingga harus melewati struktur yang panjang hingga informasi sampai ke warga desa terdampak. Dalam penanganan sebuah bencana, komunikasi merupakan bencana kedua setelah bencana itu sendiri. Untuk menghindari bencana komunikasi di masyarakat, maka PLTA Koto Panjang juga melakukan koordinasi bersama radio dan media yang terdapat di daerah Kampar. PLTA Koto Panjang menilai bahwa cara tersebut merupakan cara yang cukup baik untuk menghindari keraguan terhadap informasi terkait bencana di masyarakat, dan hal tersebut dapat membantu kecepatan informasi dimasyarakat.

Selain menggunakan media-media komunikasi diatas, dalam melakukan komunikasi terkait pembukaan pintu air, PLTA juga menggunakan media telpon kepada Bupati, Manajer Sektor PL Pekanbaru, dan BPBD Kampar untuk melakukan koordinasi bahwa pintu air sudah dibuka, dan juga PLTA menggunakan sosial media seperti grup Whatsapp untuk mengkomunikasikan bahwa sudah dilakukan pembukaan pintu, berupa surat dalam bentuk PDF. Adapun media yang digunakan saat mengkomunikasikan bencana yaitu dengan menggunakan telpon, komunikasi langsung tatap muka, grup Whatsapp (media sosial), *handy talky*, radio, dan juga toa. Seperti yang terdapat dalam buku Joseph A Devito (1997), dimana setiap anggota dapat berkomunikasi dengan jarak jauh dengan media yang dapat saling menghubungkan antara satu sama lain seperti telpon, dan setiap anggota dapat memberi dan menerima informasi dari anggota lain, meski di tempat yang berbeda.

Melihat pola komunikasi yang dilakukan PLTA Koto Panjang kepada instansi pemerintah terkait bencana lainnya, peneliti melihat bahwa adanya kecocokan pola komunikasi yang dilakukan dengan struktur roda, yaitu dimana terdapat pemimpin yang jelas. Dalam hal ini, PLTA Koto Panjang merupakan pusat informasi terkait kebencanaan yaitu buka tutup pintu air. PLTA merupakan pusat yang dapat mengirim maupun menerima pesan dari semua anggota lainnya terkait pembukaan, penambahan, dan penutupan pintu air.

Setelah mendapat informasi terkait pembukaan pintu air yang dilakukan oleh PLTA Koto Panjang, selanjutnya pemerintah melakukan koordinasi secara formal maupun non-formal tergantung situasi dan kondisi. Secara formal, pemerintah mengadakan rapat untuk melakukan koordinasi awal, namun jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka koordinasi penanggulangan bencana dilakukan secara non-formal yaitu melalui telpon atau grup Whatsapp. Selain itu, tidak selamanya pembukaan pintu menyebabkan terjadinya bencana, maka saat mendapat informasi pembukaan pintu, BPBD melakukan pengecekan bagaimana kenaikan air di sungai. Jika tinggi, dan dilihat adanya potensi bencana, maka kemudian Tim Reaksi Cepat

yang berada dibawah PUSDALOPS melakukan monitoring dan memberikan laporan langsung terkait pendataan di desa yang terdampak melalui grup Whatsapp yang didalamnya terdapat Kepala Pelaksana dan Kabid. Kedaruratan dan Logistik BPBD. Selanjutnya koordinasi turun kepada anggota kedaruratan dan logistik, dan juga melakukan koordinasi bersama relawan dan aparat desa melalui telpon, kemudian mengevakuasi warga yang terdampak bersama. Dalam melakukan penanggulangan bencana, yang menjadi pusat komando yaitu kepala satuan yang berasal dari kemilitiren.

Peneliti melihat adanya kecocokan pola komunikasi yang dilakukan dengan pola komunikasi struktur Y. Menurut Devito (1997:345), dalam struktur Y terdapat pemimpin yang jelas, dan anggota dibawahnya berperan sebagai pemimpin kedua, sehingga kedua pemimpin tersebut dapat saling memberi dan menerima pesan dari 2 anggota lainnya. Jika dikaitkan dengan pola komunikasi, Dandim merupakan pusat koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir Kampar, dan BPBD menjadi pemimpin kedua.

Dalam melakukan masa tanggap darurat, kecepatan informasi, komunikasi yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat menjadi suatu hal yang penting. Hal tersebut perlu dilakukan agar warga yang menjadi korban akibat banjir langsung mendapat pemulihan dari sisi psikologis. Saat masa tanggap darurat, alur komunikasi dalam melakukan koordinasi lebih bersifat struktural dan terdapat alur komunikasi kebawah, yaitu koordinasi berasal dari tingkat hirarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah.

C. Pola Komunikasi Menggunakan Struktur Rantai Pada Masa Pasca bencana

Setelah bencana merupakan fase terakhir dalam proses penanggulangan bencana. Masa pasca bencana merupakan sebuah proses pemulihan yang harus dilakukan baik secara moral maupun kondisi sosial ekonomi warga setempat yang terdampak bencana. Pasca bencana terdiri atas tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.

Setelah Bencana, terjadi proses pencatatan kerugian baik dari infrastruktur desa maupun kerugian yang dialami warga. Hal tersebut bermaksud agar setiap kerugian yang terdapat dampak dari banjir dapat diperbaiki kembali dan diganti, namun tidak semua pendataan yang dilaporkan mendapat ganti rugi, karena hal itu juga dilihat dari seberapa besar jumlah kerugian. Setelah bencana juga terdapat proses rekonstruksi, yaitu perbaikan pada setiap infrastruktur yang terkena dampak dari banjir.

Komunikasi yang dilakukan dalam pencatatan kerugian yaitu, BPBD, Dinas Sosial beserta aparat desa, berkoordinasi dalam mencatat setiap kerugian warga. Setelah mendapat data dari warga, maka data tersebut dilaporkan oleh aparat desa ke Kecamatan, dari Kecamatan lapor ke Kabupaten. Namun, tidak jarang pula pendataan kerugian tidak melewati tingkat hirarki yang panjang, pendataan kerugian terkadang diberikan langsung kepada BPBD, maupun Dinas Sosial.

Melihat proses komunikasi di atas, dinilai cocok dengan struktur rantai. Alur komunikasi yang dilakukan yaitu secara struktural dan non-struktural. Secara struktural, pola komunikasi memiliki arus komunikasi ke atas, dimana tingkat hirarki dalam proses tersebut berasal dari yang paling rendah, yaitu warga yang terdampak hingga ke hirarki yang tertinggi dalam lingkup Kabupaten, yaitu Bupati Kampar. Namun secara non-struktural, proses tersebut dapat berjalan lebih cepat, dimana BPBD dan Dinas Sosial dapat langsung turun ke warga dan mencatat kerugian, sehingga tidak perlu melalui proses pelaporan dari warga ke Desa.

D. Analisis SWOT dan Ulasan

Analisis SWOT secara umum yaitu Kekuatan yang peneliti temukan dalam penelitian ini secara keseluruhan yaitu komunikasi yang dilakukan antara pemerintah, relawan, dan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana sudah sangat baik, dimana terdapat komunikasi dan komunikator yang jelas. Penggunaan media sosial grup whatsapp dan telpon saat dalam penyebaran informasi dan melakukan koordinasi pada masa tanggap darurat merupakan pilihan media yang cukup tepat

dimana dalam melakukan komunikasi kebencanaan tidak hanya dapat dilakukan secara formal dimana harus melewati tingkatan birokrasi yang sangat panjang.

Komunikasi terkait kebencanaan tidak hanya dilakukan melalui media sosial namun juga komunikasi tatap muka langsung yang dilakukan pemerintah dan masyarakat kawasan rawan bencana. Selanjutnya, dalam melakukan masa tanggap darurat sudah terdapat pemimpin yang jelas, sehingga alur informasi dan komunikasi juga terlihat jelas. Tanggap darurat yang dilakukan pemerintah sudah dilakukan dengan sigap, selain itu masyarakat juga sudah mengerti apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, sehingga membuat tahap penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat mengurangi terdapatnya korban jiwa.

Kelemahan yang terdapat dalam melakukan komunikasi bencana yaitu pada masa pra bencana belum dilakukannya simulasi uji coba pada saat gladi bersama relawan yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya, masih belum adanya simbol-simbol bencana di kawasan rawan bencana, dan kelemahan yang terakhir yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi masih kurang optimal sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat terdampak.

Adapun peluang yang terdapat pada penelitian ini yaitu peneliti melihat jika program sosialisasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan rutin desa, maka akan banyak masyarakat yang terlibat dan mengetahui bahwa adanya program pencegahan resiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dinilai sudah sangat baik sehingga dapat mengurangi keluhan dari masyarakat.

Ancaman yang terdapat berdasarkan komunikasi bencana yang dilakukan yaitu masyarakat akan menganggap bahwa program terkait pencegahan resiko bencana yang dilakukan pemerintah bukan merupakan suatu hal yang penting lagi untuk diikuti jika waktu pelaksanaan dilakukan pada saat jam kerja warga desa. Selanjutnya ancaman yang terdapat dalam komunikasi bencana yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat yang menganggap bahwa BPBD bukan merupakan satu-satunya dinas yang menanggulangi bencana, sehingga penanggulangan bencana tidak

hanya merupakan tanggungjawab BPBD tetapi juga dinas-dinas terkait kebencanaan lainnya.

Adapun usulan dari peneliti yaitu usulan yang dapat peneliti diberikan yaitu pertama, pemerintah menjaga komunikasi yang sudah berjalan antara pemerintah dan masyarakat baik melalui media sosial maupun komunikasi langsung, agar setiap pihak dapat bekerjasama dengan efektif. Kedua, melakukan sosialisasi di kegiatan rutin warga sehingga tidak mengganggu waktu kerja masyarakat, selain itu dinas terkait dapat menghemat biaya sehingga dapat dialokasikan ke program bencana yang lain, selain itu pemerintah juga dapat menggunakan media lain dalam melakukan sosialisasi pencegahan resiko bencana seperti pemutaran film yang berkaitan dengan bencana

Ketiga, simulasi untuk menanggulangi bencana saat tanggap darurat, agar dapat diikuti oleh setiap dinas-dinas terkait yang termasuk dalam rencana kontijesi yang sudah ditandatangani oleh Bupati. Keempat, pemasangan simbol-simbol bencana merupakan suatu hal yang penting untuk melakukan evakuasi. Kelima, penempatan sumber daya alam dalam melakukan kebencanaan sebaiknya dilakukan dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu masyarakat harus lebih aktif dalam mengetahui karakteristik dan mengikuti program pencegahan resiko bencana yang dilakukan pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu dalam melakukan penanggulangan bencana banjir di daerah Kampar, Riau, terdapat 3 pola komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat yaitu, pola komunikasi rantai dan pola komunikasi roda pada saat pra bencana, pola komunikasi roda dan pola komunikasi Y pada saat tanggap darurat, dan pola komunikasi rantai pada saat pasca bencana. Pada ketiga pola komunikasi ini,

alur yang terdapat dalam melakukan komunikasi yaitu alur yang terstruktur dan non terstruktur. Berdasarkan rumusan masalah, peneliti dapat menarik kesimpulan seperti berikut:

Program yang dijalankan BPBD dalam menanggulangi bencana yaitu Desa Tangguh Bencana. Pemilihan desa untuk menjalankan DESTANA berdasarkan dari tingkat keparahan dan antusias warga desa dalam melakukan program. Dari seluruh desa yang menjadi kawasan rawan bencana di daerah Kampar, BPBD baru menjalankan DESTANA di dua desa yaitu, Desa Mentulik pada tahun 2016 dan Desa Buluh Cina pada tahun 2017.

Sumber informasi kebencanaan berasal dari PLTA Koto Panjang berdasar dari analisis prakiraan cuaca yang diberikan oleh BMKG Pekanbaru, dan kemudian dilakukan monitoring oleh PUSDALOPS dan BPBD dengan melihat kenaikan air di sepanjang aliran sungai. Isi pesan dalam melakukan penanggulangan bencana berbeda-beda. Pada saat pra bencana isi pesan yaitu, prakiraan cuaca perdasarian yang diberikan oleh BMKG Pekanbaru melalui buletin (softcopy dan hardcopy). Pada saat tanggap darurat, isi pesan terkait pembukaan pintu pelimpah, pengurangan dan penambahan bukaan pintu, serta penutupan pintu pelimpah. Saat pasca bencana, isi pesan berupa laporan pendataan kerugian yang terdapat di desa maupun masyarakat. Media yang digunakan dalam menginformasikan bencana memiliki sedikit perbedaan saat prabencana, dan saat tanggap darurat.

Saat pra bencana, media yang digunakan untuk menginformasikan cuaca menggunakan buletin, media sosial (twitter dan whatsapp). Media yang digunakan saat program Desa Tangguh Bencana kepada warga yaitu, sosialisasi, pelatihan, dan simulasi. Saat tanggap darurat bencana, media yang digunakan yaitu, surat resmi, media sosial (grup Whatsapp), telfon, *handy talky*, toa, radio daerah. Media utama yang digunakan dalam melakukan komunikasi kebencanaan yaitu, grup Whatsapp. Pengirim dan penerima pesan dalam penanggulangan bencana juga berbeda-beda

setiap pola komunikasi. Pada saat prabencana, dimulai dari BMKG Pekanbaru, yang kemudian diteruskan kepada Bupati, PLTA Koto Panjang, serta dinas pemerintahan terkait bencana lainnya hingga ke aparat desa dan relawan. Saat tanggap darurat, informasi awal kebencanaan dimulai dari analisis prakiraan cuaca BMKG Pekanbaru, kepada PLTA Koto Panjang, diteruskan kepada Bupati, BPBD dan dinas terkait bencana lainnya, ke aparat desa, relawan desa, hingga masyarakat. Saat pasca bencana, informasi berasal dari warga desa, diteruskan kepada pemerintah.

Pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada saat pra bencana peneliti membagi pola komunikasi menjadi 2 kategori, yaitu pola komunikasi rantai dan pola komunikasi roda. Pola komunikasi rantai, merupakan pola yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait status cuaca, dimana dalam pola komunikasi ini BMKG Pekanbaru merupakan sumber informasi terkait prakiraan cuaca dalam 1 hari, persepuluh hari hingga prakiraan cuaca dalam satu bulan kedepan, kemudian informasi tersebut disebarkan kepada pihak pemerintah terkait bencana, yaitu Bupati Kampar, PLTA Koto Panjang, BPBD Kampar, dan dinas-dinas lainnya. Kemudian informasi tersebut di turunkan Bupati ke Kecamatan, Kecamatan ke Desa.

Alur komunikasi yang terdapat dalam pola komunikasi tersebut yaitu alur komunikasi secara struktural, dimana terdapat alur birokrasi dalam melakukan komunikasi yaitu dari tingkat hirarki yang lebih tinggi hingga ke yang rendah. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pola komunikasi rantai, BPBD berada di posisi tengah dimana BPBD dapat melakukan komunikasi dengan BMKG Pekanbaru dan dapat melakukan komunikasi kepada aparat desa, relawan hingga masyarakat.

Untuk Pola komunikasi roda yaitu, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Komunikasi dapat dilakukan secara struktural dan non-struktural. Hal tersebut dikarenakan, media yang digunakan dalam melakukan komunikasi tidak hanya terpaut pada satu media yaitu buletin, namun bisa

menggunakan berbagai media, sehingga timbul adanya komunikasi timbal balik yang terdapat antara pemerintah dan masyarakat. Yang menjadi pusat dalam melakukan pola komunikasi roda yaitu BPBD Kampar.

Pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada saat tanggap darurat bencana yaitu campuran antara pola komunikasi roda dan pola komunikasi Y. Untuk pola komunikasi roda saat tanggap darurat, jika dikaitkan dengan pola komunikasi yang dilakukan dalam melakukan penyebaran informasi kepada seluruh pihak terkait bencana, PLTA Koto Panjang merupakan pusat informasi. Untuk melakukan tanggap darurat secara cepat dan tepat, pemerintah tidak hanya menggunakan surat resmi sebagai media, tetapi pemerintah juga menggunakan media lain untuk mempercepat jalannya komando. Dalam melakukan tanggap darurat bencana, terdapat alur struktural dan non-struktural dalam melakukan komunikasi. Jika dikaitkan dengan pola komunikasi Y, dalam melakukan penanggulangan saat tanggap darurat bencana, Dandim bertindak sebagai titik pusat komando, dan dibawahnya terdapat BPBD sebagai pemimpin kedua, beserta dinas-dinas terkait bencana lainnya yang terdapat dibawah. Hal itu memperlihatkan bahwa adanya alur komunikasi yang struktural, dimana pemimpin ketiga dan kedua dari bawah, dalam hal ini Dandim dan BPBD, dapat melakukan komunikasi baik dengan atasan maupun anggota yang berada dibawahnya.

Saat pasca bencana, terdapat pola komunikasi rantai. Pada saat pasca bencana alur informasi bersifat struktural dan non-struktural, karena saat pascabencana terdapat proses pendataan kerugian yang terdapat dimasyarakat. Pendataan kerugian tersebut dapat langsung dilakukan dengan melewati tingkat hirarki dari bawah ke atas, namun juga dapat dicatat langsung oleh BPBD dan Dinas Sosial ketika turun langsung saat bertanya ke warga. Yang menjadi pusat saat pasca bencana yaitu desa.

Faktor pendukung saat melakukan tanggap darurat bencana yaitu banyaknya stakeholder, misal TNI, Polri, relawan di bawah Dinas Lingkungan Hidup, relawan di

bawah Dinas Sosial yaitu Tagana). Sedangkan faktor penghambat saat melakukan tanggap darurat bencana terbagi menjadi dua yaitu, kendala internal dan kendala eksternal. Terdapat dua kendala internal dalam melakukan penanggulangan bencana, pertama kendala dari peralatan, dalam hal ini kendaraan operasional. Kendaraan operasional hanya terdapat 2, dimana terkadang dalam satu tempat dibutuhkan lebih dari 2 kendaraan operasional, sehingga tidak jarang mengharuskan anggota BPBD menggunakan kendaraan pribadi, selain itu kendala dari luas wilayah dan daerah yang sulit dijangkau.

Kendala internal kedua yang dirasa cukup vital yaitu, kurangnya sumber daya manusia yang memang berkompetensi dibidang kebencanaan, penempatan sumber daya manusia yang kurang tepat. Selain kendala internal, terdapat pula kendala eksternal yaitu, kurang berjalannya rencana kontigensi yang telah disepakati bersama melalui Pemerintah Daerah dengan instansi terkait yang terhubung dengan kebencanaan, hal ini disebabkan berbagai pihak melangkah sendiri-sendiri, sering tanpa koordinasi. Selain itu, terdapat pula kendala pada anggaran dana, kendala dikoordinasi dengan instansi terkait mengenai koordinasi lapangan, dan kendala mengenai kurangnya kesadaran masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang peneliti rasakan dalam melakukan penelitian ini yaitu, masih banyak stakeholders yang belum diwawancarai seperti, TNI, Polri, dan dinas-dinas terkait kebencanaan lainnya. Potensi bencana di daerah Kabupaten Kampar tidak hanya banjir, namun juga terdapat bencana lainnya seperti kabut asap dan longsor.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti lakukan kepada beberapa pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana banjir Kampar, yaitu:

1. Saran kepada BPBD Kabupaten Kampar, yaitu agar dapat melakukan program sister village dalam melakukan mitigasi bencana. Sehingga ketika terjadi bencana,

warga desa tidak hanya mengungsi di tempat evakuasi akhir namun juga dapat mengungsi di rumah warga.

2. Program mitigasi bencana dapat merata di seluruh desa yang menjadi kawasan rawan bencana

3. Warga yang berada di kawasan rawan bencana dapat memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi dalam menanggulangi bencana di daerahnya, agar dapat bekerjasama dengan baik bersama pemerintah.

Daftar Pustaka

Buku

- Arie, Priambodo S. (2009). *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: Kanisius
- Calvin, Hall, Lindzey Gardner. (1993). *Psikologi Kepribadian 2, Teori-Teori Holistik(Organismik-Fenomenologis)*. Yogyakarta: Kanisius
- Devito, Joseph A. (1997). *Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta: Professional Book
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press
- J.R, Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Kuswarno, Engkus. (2009). *Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Nurjanah, et.al. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: ALFABETA, cv
- Patilima, Hamid. (2005) . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Purnomo, Hadi, Ronny Sugiantoro. (2010). *Manajemen Bencana: Respons Dan Tindakan Terhadap Bencana*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Pb, PUSDALOPS “Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2013”
- Pb, PUSDALOPS “Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar”
- Soehatman, Ramli. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta: PT DIAN RAKYAT
- Sugiarto, Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Suprpto, Tommy. (2009). *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo

Susanto, Eko Harry. (2011). *Komunikasi Bencana*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo

Tubbs, Stewart L dan Sylvia Moss. (1996). *Human Communication ; Prinsip-prinsip Dasar, buku 1*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Undang-Undang

Peraturan Bupati Kampar Nomor 56 Tahun 2012 tanggal 2 Oktober 2012
Tentang Uraian tugas Jabatan Struktural Dilingkungan Dinas/Badan dan Kantor di Kabupaten Kampar

Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 – 2016

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana

Internet

Analisa Daily “Data Kejadian banjir tahun 2016”
<http://news.analisadaily.com/read/kejadian-banjir-meningkat-52-persen-di-2016/292422/2016/12/29> (akses 3 April 2018)

BPBD Provinsi Riau “Data Statistik Bencana” <http://bpbdriau.go.id/public/>
(akses 25 maret 2017)

BNPB “Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana”
<https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/40.pdf> (akses 10 April 2017)

Tribun Pekanbaru “Banjir Riau” <http://pekanbaru.tribunnews.com/topic/banjir-riau>
(akses 11 Maret 2017)

Pecinta Ilmu “Kronologi Sejarah Danau PLTA Koto Panjang, Kampar Riau”
<http://www.putramelayu.web.id/2013/05/kronologi-sejarah-danau-plta-koto.html> (akses 11 Maret 2017)

- BMKG Pekanbaru “Tugas dan Fungsi” <http://www.stametpekanbaru.com/> (akses 28 Maret 2017)
- Kampar, Kabupaten “Data Sementara Banjir di Kampar” <http://kamparkab.go.id/home/berita/bangkinang-kota/ini-data-sementara-peristiwa-banjir-di-kampar.html> (akses 26 Maret 2018)
- Musyadad, *et.al* “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak” <http://repository.fisip-untirta.ac.id/560/> (akses 3 April 2017)
- Nisa’ “Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang” <http://repository.unair.ac.id/16217/> (akses 3 April 2017)
- Surtini “Kontribusi badan penanggulangan bencana daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pencegahan bencana banjir kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu” <http://repository.uin-suska.ac.id/3482/> (akses 4 April 2017)
- Putra dan Sri Hastjarjo “Aktivitas Komunikasi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar (Deskriptif Kualitatif Mengenai aktivitas Komunikasi di BPBD Kab. Karanganyar dalam Pengenalan Mitigasi Bencana Kepada Masyarakat Kab. Karanganyar)” <https://eprints.uns.ac.id/26738/> (akses 5 April 2017)
- Peta Kota “Peta Kota Kabupaten Kampar” <http://peta-kota.blogspot.co.id/2017/01/peta-kabupaten-kampar.html> (akses 1 April 2018)
- Syarif, *et.al* “Pentingnya Komunikasi dan Informasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulan Bencana di Kota Makassar” <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/viewFile/583/406> (akses 30 April 2017)